

**PENDAMPINGAN MAHASISWA MAGANG DALAM PENERAPAN
GOOD GOVERNANCE DALAM PENYUSUNAN MANUAL BOOK TIM
KERJA KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Nadea Legitasari

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
nadealegitasari@gmail.com;

Radjikan

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
radjikan@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Manual book Tim Kerja Keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien, sesuai prinsip good governance. Manual book ini dirancang sebagai panduan operasional bagi Tim Kerja Keuangan, mencakup alur kerja, prosedur verifikasi dokumen, serta tata cara penyusunan laporan keuangan. Proses penyusunannya melibatkan pengumpulan data, analisis kebutuhan, dan pendokumentasian secara terstruktur, dengan pendekatan partisipatif dari pegawai yang terlibat. Manual book memberikan manfaat nyata, seperti meminimalkan kesalahan administratif, menyederhanakan proses kerja, dan meningkatkan pemahaman pegawai tentang tanggung jawab masing-masing. Meski menghadapi tantangan seperti kompleksitas prosedur, solusi berbasis pelatihan dan supervisi diterapkan untuk memastikan efektivitasnya. Untuk pemanfaatan optimal, disarankan adanya sosialisasi menyeluruh, pelatihan rutin, dan pembaruan berkala agar isi manual book selalu relevan dengan regulasi terbaru. Upaya ini mendukung modernisasi birokrasi yang profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Kata kunci: *Pendampingan magang, Tata kelola keuangan, good governance, akuntabilitas.*

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan yang baik *good governance* merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sekaligus mendorong keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi. Berdasarkan laporan (OECD 2020), penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi telah berhasil meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya publik, mengurangi praktik korupsi, dan menjaga stabilitas kebijakan fiskal. Selain itu, Bank Dunia mencatat bahwa pemerintah yang mengadopsi *good governance* mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas

pelayanan publik secara signifikan (World Bank 2018).

Di Indonesia, langkah-langkah untuk menerapkan prinsip-prinsip ini telah dilakukan melalui regulasi seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Demikian pula, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran secara mandiri, asalkan tetap mengikuti prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan masih muncul, termasuk kurangnya kompetensi sumber daya manusia dan dokumentasi administrasi yang belum optimal, sebagaimana disampaikan oleh (Indrawati, 2012).

Dalam praktiknya, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan, termasuk di instansi pemerintahan seperti Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. *Good governance* mencerminkan pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia (Baren et al., 2022). Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat. Dengan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN, dana tersebut digunakan untuk beragam kegiatan seperti pengadaan alat kesehatan, pembangunan infrastruktur kesehatan, hingga pembiayaan program-program pelayanan kesehatan. Namun, lembaga ini menghadapi sejumlah kendala, seperti penerapan SOP dan manual book yang belum maksimal. Meskipun telah tersedia panduan, implementasi prosedur sering kali tidak konsisten, yang berdampak pada kelancaran tugas administratif. Proses persetujuan dokumen juga sering terlambat karena kendala waktu dari pihak yang bertanggung jawab, sehingga memengaruhi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kesehatan. Kendala ini dapat diatasi dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan semua pihak dan berdasarkan data. Pelatihan dan pengawasan yang memadai diperlukan agar manual book dapat diterapkan secara efektif (Universitas Padjadjaran, 2017).

Sebagai solusi, penyusunan Manual Book Tim Kerja Keuangan dirancang untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Penyusunan ini didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, di mana transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses, akuntabilitas dicapai melalui pembagian tanggung jawab yang jelas, dan efisiensi diupayakan dengan menyederhanakan prosedur tanpa mengurangi kualitas pengelolaan keuangan. Manual ini diharapkan menjadi panduan teknis yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dengan meminimalkan kesalahan administratif dan mempercepat proses evaluasi serta pelaporan.

Kegiatan magang ini secara khusus bertujuan untuk mendukung penyusunan Manual Book Tim Kerja Keuangan yang menjadi pedoman utama dalam pengelolaan keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Manual book ini dirancang untuk menyediakan panduan operasional yang terperinci dan sistematis, mencakup pembagian tugas, alur kerja, dan prosedur standar dalam administrasi keuangan. Mahasiswa magang dilibatkan langsung dalam tahapan penyusunan, mulai dari pengumpulan data, analisis kebutuhan, hingga penulisan dokumen

manual. Isi manual book meliputi profil tim kerja, alur kerja yang disertai diagram untuk mempermudah pemahaman, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mendetail untuk berbagai aktivitas keuangan. Manual ini juga mencantumkan dasar hukum dan regulasi sebagai acuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penyusunan manual book ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dan akurasi dalam pelaksanaan tugas, meminimalkan kesalahan administratif, serta mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

B. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan magang di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berlangsung selama 40 hari kerja, mulai dari 13 Januari hingga 11 Maret 2025, dengan jam kerja Senin hingga Jumat pukul 08.00–16.00 WIB. Pelaksanaannya mencakup beberapa tahapan utama, yaitu observasi, persiapan, pelaksanaan, dokumentasi, dan laporan. Proses magang diawali dengan *tahap observasi* untuk menanyakan ketersediaan kuota magang di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Setelah memperoleh konfirmasi mengenai ketersediaan tersebut, dan dilanjutkan dengan *tahap persiapan*, penulis membuat proposal magang, curriculum vitae, dan melengkapi dokumen pendukung seperti surat rekomendasi dari fakultas, transkrip nilai, dan surat pengantar dari pihak universitas. Setelah tahap persiapan, dilakukan koordinasi terkait jadwal, lokasi, dan tugas yang akan dilaksanakan selama magang. Pada *tahap pelaksanaan* penulis ditempatkan di bagian Tim Kerja Keuangan dan terlibat dalam berbagai kegiatan administratif, termasuk pembuatan Manual Book Tim Kerja Keuangan yang bertujuan untuk memberikan panduan operasional yang jelas bagi pengelola keuangan. Selanjutnya *tahap dokumentasi* melibatkan pengumpulan data terkait aktivitas magang, baik dalam bentuk foto, video, maupun dokumen tertulis. Proses ini bertujuan untuk mencatat dan merekam seluruh kegiatan yang dilakukan sebagai referensi dan bahan evaluasi. *Tahap laporan* menjadi tahap terakhir yang merangkum seluruh kegiatan hasil dan temuan selama magang dalam bentuk laporan tertulis yang sistematis dan komprehensif.

Metode pelaksanaan magang ini menekankan penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan. Penyusunan manual book keuangan difokuskan untuk menjadi panduan yang terstruktur bagi Tim Kerja Keuangan dalam mengelola keuangan secara lebih optimal. Tahap dokumentasi mencakup pengumpulan dan penyimpanan data keuangan serta administrasi yang dilakukan secara digital, termasuk pengambilan foto atau video untuk mendokumentasikan kegiatan magang. Tahap akhir adalah penyusunan laporan magang yang merangkum seluruh aktivitas, data yang diperoleh, serta analisis terhadap pelaksanaan tugas, yang memberikan gambaran tentang kontribusi dan pengalaman selama magang.



Gambar 1: Bagan Alir Kegiatan

C. HASIL dan PEMBAHASAN

Pelaksanaan magang di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memberikan banyak pengalaman dan wawasan terkait pengelolaan keuangan negara. Penulis ditempatkan di bagian Tim Kerja Keuangan yang bertanggung jawab atas berbagai tugas administrasi keuangan, termasuk penyusunan manual book. Manual book ini merupakan dokumen panduan yang dirancang untuk memastikan proses keuangan berjalan sesuai dengan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Panduan ini diharapkan menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan, seperti ketidaksesuaian prosedur dan kesalahan administrasi.

Selama magang, salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh penulis adalah penyusunan Manual Book Tim Kerja Keuangan Tahun 2025. Manual book ini berfungsi sebagai panduan operasional yang berisi informasi mendalam terkait perencanaan kegiatan, pengelolaan anggaran, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta prosedur standar (SOP) yang diterapkan oleh Tim Kerja Keuangan. Penyusunan manual ini merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta peraturan-peraturan yang berlaku, menjadikannya sebagai acuan yang sah dalam kegiatan operasional di bidang keuangan. Manual book memuat berbagai elemen penting yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Kerja Keuangan. Beberapa elemen utama meliputi dasar hukum, tujuan penyusunan manual book, serta uraian kegiatan dan proses kerja yang dilakukan oleh Tim Kerja Keuangan. Salah satu bagian penting adalah deskripsi tanggung jawab, yang mencakup tiga kegiatan inti: penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD, pengelolaan bahan tanggapan pemeriksaan, serta koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan tahunan SKPD. Manual book ini juga dilengkapi dengan panduan alur kerja yang terperinci, termasuk prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan proses verifikasi dokumen.



Gambar 2: Proses Penyusunan Manual Book

Dalam proses penyusunan manual book, penulis terlibat langsung dalam berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan struktur dan isi dokumen Manual Book Tim Kerja Keuangan. Penulis diberi tanggung jawab untuk menulis dan merapikan bagian-bagian penting seperti profil tim kerja, pembagian tugas, alur pelaksanaan kegiatan, dan proses bisnis yang menggambarkan langkah-langkah dari input hingga output yang dihasilkan. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai prosedur keuangan yang sedang berjalan, dokumen pendukung, serta berbagai masukan terkait tantangan yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas. Melalui pengolahan data tersebut, penulis menyusun panduan yang sistematis dengan mendokumentasikan alur kerja secara rinci. Panduan ini meliputi tugas dan fungsi Tim Kerja Keuangan, prosedur verifikasi dokumen, hingga tata cara penyusunan laporan keuangan tahunan.



Gambar 1: Diskusi Manual Book

Setelah penyusunan selesai, manual book yang telah dikerjakan oleh penulis didiskusikan bersama tim kerja keuangan untuk dievaluasi. Diskusi ini bertujuan

untuk memastikan bahwa isi manual book sesuai dengan kebutuhan operasional dan peraturan yang berlaku. Proses evaluasi ini melibatkan revisi dan penyempurnaan terhadap bagian-bagian yang memerlukan penyesuaian atau penyederhanaan, sehingga manual book dapat lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh pihak yang terlibat. Proses ini memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi mahasiswa dalam memahami mekanisme kerja birokrasi, struktur organisasi, serta sistem perencanaan dan pelaporan keuangan di sektor pemerintahan.

Penyusunan manual book juga memiliki dampak positif dalam menciptakan budaya kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam diskusi yang dilakukan bersama pegawai, diketahui bahwa manual book membantu pegawai memahami tanggung jawab masing-masing dan mengurangi kebingungan terkait prosedur keuangan. Pegawai yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memahami alur kerja tertentu kini merasa lebih terbantu dengan panduan yang terstruktur. Namun, proses ini juga mengungkapkan beberapa tantangan, seperti perlunya penyederhanaan prosedur tertentu agar lebih mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, penyusunan Manual Book Tim Kerja Keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Panduan ini tidak hanya membantu dalam menyelesaikan masalah administrasi yang ada, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat untuk reformasi birokrasi yang lebih luas. Dengan dukungan teknologi dan komitmen dari seluruh pihak, manual book dapat menjadi salah satu inovasi penting yang mendukung prinsip good governance. Penyusunan manual book ini diharapkan menjadi model yang dapat diterapkan di instansi lain, sehingga tata kelola keuangan di sektor publik semakin transparan, akuntabel, dan efisien.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyusunan Manual Book Tim Kerja Keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan. Proses penyusunan manual book yang transparan, akuntabel, dan efisien telah membantu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, meminimalkan kesalahan administratif, serta mempercepat proses kerja. Melalui pendekatan partisipatif, manual book ini tidak hanya menjadi panduan teknis yang relevan, tetapi juga alat strategis untuk mendorong reformasi birokrasi. Dengan adanya panduan yang jelas dan terstruktur, pegawai lebih memahami tanggung jawab mereka, sehingga budaya kerja yang lebih profesional dan berorientasi pada hasil dapat tercapai. Prinsip transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh semua pihak terkait. Akuntabilitas dicapai dengan pembagian tugas yang terdefinisi dengan baik, sementara efisiensi didorong melalui penyederhanaan alur kerja tanpa mengurangi kualitas pengelolaan keuangan. Proses penyusunan manual book juga mencakup evaluasi dan diskusi yang memungkinkan penyempurnaan berdasarkan kebutuhan operasional, menjadikan dokumen ini responsif terhadap dinamika yang ada.

Untuk memastikan penerapan Manual Book Tim Kerja Keuangan berjalan optimal, disarankan dilakukan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh pegawai, disertai pelatihan rutin guna meningkatkan pemahaman dan konsistensi implementasi. Pembaruan manual book perlu dilakukan secara berkala agar tetap relevan dengan regulasi terbaru. Selain itu, integrasi manual book ke dalam sistem digital dapat mempermudah akses dan monitoring.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrawati. (2012). *Prinsip Good Financial Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance*. <https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303002803047914/8.pdf>
- Meningkatkan Kinerja Sektor Publik: Melalui Inovasi dan Koordinasi Antar Lembaga (Vol. 1 dari 2)*. (n.d.). Retrieved May 9, 2025, from <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/833041539871513644/improving-public-sector-performance-through-innovation-and-inter-agency-coordination>
- Mobilising Evidence for Good Governance*. (2020). <https://doi.org/10.1787/3F6F736B-EN>
- Universitas Padjadjaran. (2017). *Manual Standar Pengelolaan Keuangan*. <https://fkep.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2024/07/manual-standar-pengelolaan-keuangan-32.pdf>
- Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2022). Penerapan Good Governance dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14323–14334. <https://doi.org/10.31004/JPTAM.V6I2.4702>